

**PERAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
OPTIMALISASI BELANJA DAERAH UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2014-2023**



Diajukan Oleh:
BAGAS WIRANATA
22918013

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**PERAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
OPTIMALISASI BELANJA DAERAH UNTUK
MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2014-2023**

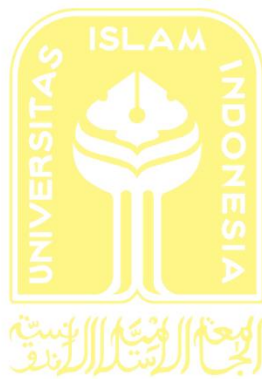
Tesis S-2
Program Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan Oleh:
BAGAS WIRANATA
22918013

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 21 Februari 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Widarjono', is placed below the text 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

BAGAS WIRANATA

No. Mhs. : 22918013

Konsentrasi : Ekonomi Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**PERAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI BELANJA
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2014-2023**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Penguji II

Prof. Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 21 Februari 2025



Bagas Wiranata

TESIS

**PERAN REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM OPTIMALISASI
BELANJA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING SEKTOR
UNGGULAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2014-2023**

Diajukan oleh

Bagas Wiranata

22918013

telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Drs. Agus Widarjono., MA., Ph.D.

MOTTO

“ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ”

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd: 11)

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju zaman yang terbenderang seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penelitian yang berjudul “Peran Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023” disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Ekonomi dan di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah serta anugerah-Nya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Drs. Agus Widarjono., MA., Ph.D., selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, terima kasih telah meluangkan waktu dalam membimbing dan memberikan arahan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis
3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan keperluan data dalam penulisan tesis ini.
4. Pimpinan dan staff Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul khususnya Bidang Perencanaan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan keperluan data dalam penulisan tesis ini.

5. Teman-teman seperjuangan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi angkatan 26 yang memberikan semangat dan bersama-sama menyelesaikan penulisan tesis.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Februari 2025

Penulis,



Bagas Wiranata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
RITA ACARA UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PALGIARISME.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
1 BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Regulasi	8
2.1.1.1 Definisi dan Konsep Regulasi	8
2.1.1.2 Regulasi Pemerintah Daerah	9
2.1.2 Teori Belanja Daerah	11
2.1.2.1 Konsep dan Jenis Belanja Daerah	11

2.1.2.2	Optimalisasi Belanja Daerah.....	12
2.1.2.3	Hubungan Belanja Daerah dengan Pembangunan Ekonomi	12
2.1.3	Teori <i>Location Quotient</i>	13
2.1.4	Teori Belanja Pembangunan	14
2.1.4.1	Pengertian dan Jenis Belanja Pembangunan	14
2.1.4.2	Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.5	Teori Daya Saing.....	16
2.1.5.1	Daya Saing Sektor Unggulan	17
2.1.5.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah	18
2.1.6	Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	18
2.1.6.1	Konsep Otonomi Daerah.....	19
2.1.6.2	Desentralisasi Fiskal	20
2.1.6.3	Implikasi terhadap Regulasi dan Belanja Daerah	21
2.2	Penelitian Terdahulu	22
2.3	Kerangka Berpikir.....	24
3	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
3.2	Lokasi Penelitian.....	28
3.3	Data dan Sumber Data	30
3.4	Instrumen Penelitian.....	32
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Teknik Analisis Data.....	35
3.6.1	Analisis <i>Location Quotient</i>	35
3.6.2	Korelasi Pearson.....	36
3.6.3	Uji t untuk Korelasi Pearson	37
3.6.4	Evaluasi Peran Pemerintah dengan Bukti Empiris.....	37
4	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1	Hasil Analisis <i>Location Quotient</i>	39
4.2	Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Sektor Unggulan	40

4.3	Hubungan antara Investasi Swasta dan Sektor Unggulan.....	46
4.4	Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan	48
4.5	Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta	50
4.6	Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi..	52
4.7	Hubungan antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi	54
4.8	Evaluasi Regulasi dan Strategi Pembangunan Sektor Unggulan.....	56
4.9	Optimalisasi Belanja Pembangunan Sektor Unggulan	58
5	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Saran.....	62
6	DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3.1 Operasional Data Penelitian	31
Tabel 4.1 Hasil Analisis Location Quotient	39
Tabel 4.2 Korelasi antara PDRB dan Belanja Pembangunan.....	40
Tabel 4.3 Korelasi antara PDRB dan Investasi Swasta.....	46
Tabel 4.4 Korelasi antara PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi	48
Tabel 4.5 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta	50
Tabel 4.6 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi	52
Tabel 4.7 Korelasi antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	26
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul pada periode 2014-2023. Dengan menggunakan metode analisis *location quotient* dan uji korelasi Pearson, penelitian ini meneliti hubungan antara belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pembangunan memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan alokasi dan implementasi anggaran yang tepat. Regulasi yang adaptif dan berbasis bukti empiris terbukti berperan penting dalam mendukung pengembangan sektor unggulan serta menarik investasi swasta yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih terfokus pada penguatan sektor unggulan, serta sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan daerah.

Kata Kunci: Regulasi Pemerintah Daerah, Optimalisasi Belanja Daerah, Daya Saing, Sektor Unggulan, Kabupaten Gunungkidul.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pengelolaan pemerintahan di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan ke arah desentralisasi. Kebijakan ini memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan anggarannya secara mandiri. Namun, implementasi otonomi daerah ini tidak serta-merta menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan daya saing yang merata. Salah satu tantangan utama adalah memastikan belanja pembangunan daerah dan investasi swasta mampu mendorong pertumbuhan sektor unggulan secara optimal.

Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki luas wilayah 1.485,36 km² dan populasi sebanyak 751.011 jiwa (BPS Gunungkidul, 2024). Daerah ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2024), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mencapai 5,52% pada 2023. Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam memaksimalkan sinergi antara belanja pembangunan dan investasi untuk mendukung sektor-sektor unggulan.

Belanja pembangunan merupakan instrumen strategis dalam menciptakan infrastruktur dasar dan layanan publik yang dibutuhkan untuk mendukung sektor unggulan. Berdasarkan teori belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), alokasi anggaran publik yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor prioritas. Selain itu, investasi swasta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi.

Nilai investasi di Kabupaten Gunungkidul terus meningkat sejak 2016, mencerminkan kontribusi swasta yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disajikan data belanja pembangunan dan investasi swasta selama periode 2014–2023.

Tabel 1.1 Perbandingan Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta (BPS Gunungkidul, 2024)

Tahun	Belanja Pembangunan (Miliar)	Investasi Swasta (Miliar)
2014	342,00	20,75
2015	478,20	23,65
2016	479,51	63,37
2017	688,61	84,36
2018	634,50	122,93
2019	939,69	185,65
2020	646,89	273,60
2021	717,00	282,83
2022	749,99	475,35
2023	487,13	629,17

Berdasarkan **Tabel 1.1** terlihat bahwa belanja pembangunan mengalami fluktuasi dengan tren yang tidak konsisten. Sebaliknya, investasi swasta menunjukkan peningkatan signifikan, terutama sejak 2016, dengan kenaikan dari Rp 63,37 miliar pada 2016 menjadi Rp 629,17 miliar pada 2023. Pergeseran ini menandakan meningkatnya kontribusi swasta sebagai penggerak ekonomi utama di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Laporan World Economic Forum (2023) menunjukkan bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal di beberapa aspek, termasuk inovasi dan adopsi teknologi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah seperti Gunungkidul untuk meningkatkan kapasitas inovasi dalam sektor unggulannya, sekaligus menegaskan pentingnya regulasi yang mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di tingkat lokal.

PDRB Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan, diikuti konstruksi (9,00%) dan informasi & komunikasi (8,85%) pada 2023 (BPS Gunungkidul, 2024). Namun, rendahnya kapasitas inovasi dan efisiensi pasar pada IDSD yang dirilis oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN (2024) menunjukkan perlunya pendekatan strategis untuk mengintegrasikan belanja pembangunan dan investasi swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sinergi antara belanja

pembangunan dan investasi swasta, menggunakan analisis *location quotient* guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana identifikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014–2023 berdasarkan analisis *location quotient*?
2. Bagaimana korelasi antara hasil analisis *location quotient* dengan alokasi belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul tahun periode 2014-2023?
3. Bagaimana peran regulasi, kebijakan pemerintah, dan intervensi lain dalam mendukung sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2023?
4. Bagaimana strategi optimalisasi belanja pembangunan yang dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipilih, berikut adalah paparan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2014-2023, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2014-2023 menggunakan metode *location quotient* yang termasuk ke dalam sektor unggulan.
2. Menganalisis korelasi antara hasil analisis *location quotient* dengan alokasi belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul periode 2014-2023 untuk mengevaluasi efektivitas anggaran dalam mendukung sektor unggulan
3. Mengevaluasi peran regulasi, kebijakan pemerintah, dan intervensi lainnya dalam mendukung sektor-sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul selama periode 2014-2023.
4. Mengidentifikasi strategi belanja pembangunan yang optimal dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.
2. Pengayaan Literatur: Hasil penelitian akan memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara regulasi, belanja daerah, dan daya saing sektor unggulan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

3. Basis Penelitian Lanjutan: Temuan penelitian dapat menjadi landasan untuk studi-studi lanjutan dalam bidang terkait, baik di Kabupaten Gunungkidul maupun di daerah lain dengan karakteristik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:
 - a. Menyediakan evaluasi komprehensif tentang efektivitas regulasi yang ada.
 - b. Memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan regulasi dan optimalisasi belanja daerah.
 - c. Membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan.
2. Bagi Pelaku Usaha di Sektor Unggulan:
 - a. Memberikan pemahaman lebih baik tentang kerangka regulasi yang mempengaruhi sektor mereka.
 - b. Menyediakan dasar untuk advokasi kebijakan yang lebih mendukung pengembangan usaha.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Gunungkidul:
 - a. Meningkatkan transparansi terkait proses penyusunan dan implementasi regulasi daerah.
 - b. Memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana belanja daerah dapat berdampak pada pengembangan ekonomi lokal.
4. Bagi Penelitian Masa Depan:
 - a. Pengembangan Instrumen: Instrumen penelitian yang dikembangkan dapat digunakan atau diadaptasi untuk penelitian serupa di daerah lain.
 - b. Model Analisis: Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi model untuk studi-studi sejenis di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam bentuk paragraf pada masing-masing bab untuk penelitian “Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul” adalah sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membuka penelitian dengan memaparkan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi dan relevansi topik penelitian dalam konteks Kabupaten Gunungkidul. Latar belakang ini akan menguraikan dinamika regulasi pemerintah daerah, tantangan optimalisasi belanja daerah, dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan. Selanjutnya, bab ini akan memformulasikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, diikuti dengan penjabaran tujuan penelitian yang ingin dicapai. Manfaat penelitian akan diuraikan untuk menunjukkan kontribusi studi ini baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang ruang lingkup penelitian untuk memberikan batasan yang jelas tentang cakupan studi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penelitian akan membangun landasan teoretis yang kokoh dengan mengkaji literatur terkait regulasi pemerintah daerah, konsep belanja daerah, dan teori daya saing sektor unggulan. Bab ini akan memulai dengan pembahasan mendalam tentang konsep dan proses regulasi daerah, dilanjutkan dengan eksplorasi tentang optimalisasi belanja daerah dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Konsep daya saing dan identifikasi sektor unggulan akan dibahas secara komprehensif. Konteks lebih luas tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal juga akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang holistik. Bab ini akan diakhiri dengan penyajian kerangka pemikiran teoritis yang akan menjadi dasar analisis dalam penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian akan menjelaskan secara rinci pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab ini akan menguraikan alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Gunungkidul, serta kriteria pemilihan informan dan sumber data. Teknik pengumpulan data akan dijelaskan secara komprehensif, mencakup wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Proses analisis data menggunakan pendekatan tematik akan dipaparkan, disertai dengan penjelasan tentang langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data melalui triangulasi dan member checking. Bab ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan bagaimana data akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan temuan penelitian dan analisis mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan. Dimulai dengan gambaran umum Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan konteks, bab ini kemudian akan menganalisis kondisi dan efektivitas regulasi pemerintah daerah terkait optimalisasi belanja daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi regulasi akan diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif. Berdasarkan temuan-temuan ini, bab akan mengusulkan model dan strategi regulasi yang direkomendasikan untuk mengoptimalkan belanja daerah dan meningkatkan daya saing sektor unggulan. Pembahasan akan mengintegrasikan temuan empiris dengan kerangka teoretis yang telah dibangun di Bab II, memberikan analisis yang mendalam dan kontekstual.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini akan merangkum temuan-temuan utama penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Kesimpulan akan menyajikan sintesis dari analisis yang telah dilakukan, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan kesimpulan ini, bab akan menawarkan saran-saran praktis untuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Bab ini juga akan mengakui keterbatasan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, membuka jalan bagi studi-studi lanjutan dalam bidang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini, karena terdapat landasan teori dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik peran regulasi pemerintah dalam optimalisasi belanja daerah. Peneliti mengkaji penelitian terdahulu, dengan memahami perkembangan konsep, identifikasi masalah, serta celah penelitian yang ada.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Regulasi

Teori regulasi merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana dan mengapa pemerintah melakukan intervensi dalam aktivitas ekonomi dan sosial melalui aturan-aturan formal (Labolo, 2023). Pemahaman mendalam tentang teori regulasi sangat penting dalam konteks penelitian ini, mengingat perannya yang sentral dalam membentuk kerangka kebijakan pemerintah daerah (Sidiq, 2023).

2.1.1.1 Definisi dan Konsep Regulasi

Regulasi merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi yang telah menjadi subjek kajian intensif dalam berbagai disiplin ilmu (Abqa et al., 2023). Secara umum, regulasi dapat dipahami sebagai upaya sistematis pemerintah untuk mengarahkan atau membatasi perilaku individu atau organisasi sesuai dengan tujuan tertentu (Rahman, 2017).

Baldwin, Cave, dan Lodge (2012) dalam karyanya yang berjudul "*Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*" menawarkan definisi yang komprehensif, menyatakan bahwa regulasi adalah "upaya berkelanjutan pemerintah untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan." Definisi ini menekankan bahwa regulasi tidak hanya mencakup pembuatan aturan, tetapi juga proses aktif yang dinamis untuk mengelola interaksi sosial dan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, Stigler (1971) mendefinisikan regulasi sebagai "aturan yang dirancang dan ditegakkan oleh pemerintah yang dapat membatasi

aktivitas dan keputusan agen ekonomi." Perspektif ini relevan dalam menganalisis dampak regulasi terhadap efisiensi pasar, distribusi sumber daya, dan insentif pelaku ekonomi.

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, regulasi mencakup penyusunan kebijakan berdasarkan kewenangan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Regulasi daerah bertujuan untuk mengelola pembangunan, termasuk pengalokasian belanja daerah, agar selaras dengan kebutuhan lokal dan prioritas pembangunan.

Di Kabupaten Gunungkidul, pemahaman komprehensif tentang konsep regulasi sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang berdampak pada optimalisasi belanja daerah serta pengembangan sektor unggulan. Analisis mendalam tentang efektivitas regulasi ini akan membantu memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan daya saing wilayah.

2.1.1.2 Regulasi Pemerintah Daerah

Regulasi pemerintah daerah adalah instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan, mengontrol, atau membatasi aktivitas sosial dan ekonomi di wilayahnya (Baldwin, Cave, & Lodge, 2012). Dalam konteks pemerintahan daerah, Selznick (1985) memperluas pemahama memperluas definisi ini dengan menekankan peran lembaga lokal dalam mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat dalam regulasi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, regulasi bertujuan untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif, menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan ekonomi, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Black (2002) menambahkan bahwa regulasi tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan aktor non-pemerintah.

Regulasi pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan dan fungsi utama:

1. Mengatasi Kegagalan Pasar: Mengoreksi inefisiensi pasar lokal, seperti monopoli atau eksternalitas (Pigou, 1932).
2. Perlindungan Kepentingan Publik: Melindungi kesejahteraan masyarakat lokal (Teori Kepentingan Publik).

3. Optimalisasi Sumber Daya Daerah: Mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan.
4. Peningkatan Daya Saing Daerah: Menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan sektor unggulan.

Dengan Landasan hukum utama regulasi pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada:

1. UUD 1945 Pasal 18: Menegaskan otonomi daerah.
2. UU No. 23 Tahun 2014: Mengatur pemerintahan daerah dan pembagian kewenangan.
3. UU No. 12 Tahun 2011: Mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Asshiddiqie (2010), regulasi daerah harus selaras dengan hierarki hukum nasional, termasuk peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Prinsip-prinsip regulasi daerah meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan kedayagunaan (Soemantri, 1992). menurut Indrati (2007) proses pembentukan regulasi mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas regulasi (Ridwan, 2014). Beberapa tantangan yang dihadapi menurut Agustino (2011) antara lain kapasitas SDM pemerintah daerah, koordinasi antar lembaga, harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Solusi yang ada berupa penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan transparansi, dan penyederhanaan prosedur. Regulasi daerah berperan strategis dalam mengarahkan alokasi belanja daerah untuk sektor prioritas. Regulasi yang efektif dapat menciptakan insentif, menyederhanakan prosedur, dan melindungi sektor unggulan. Hal ini penting dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Gunungkidul.

2.1.2 Teori Belanja Daerah

Teori Belanja Daerah merupakan bagian integral dari konsep keuangan publik dan desentralisasi fiskal. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, belanja daerah menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Mardiasmo (2009) mendefinisikan belanja daerah sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Struktur belanja daerah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Halim (2007) menjelaskan bahwa klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, serta untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas belanja daerah.

Perkembangan terkini dalam teori belanja daerah juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dan inklusi sosial. Sachs (2015) dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pentingnya pengarusutamaan aspek keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, aplikasi teori belanja daerah harus mempertimbangkan karakteristik lokal dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

2.1.2.1 Konsep dan Jenis Belanja Daerah

Konsep belanja daerah juga erat kaitannya dengan prinsip *value for money* dalam pengelolaan keuangan publik. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks belanja daerah, prinsip ini menekankan pentingnya penggunaan sumber daya keuangan secara hemat, tepat guna, dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Yuwono et al. (2008) juga menekankan pentingnya analisis belanja daerah dalam konteks perencanaan pembangunan. Analisis ini meliputi analisis

pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, analisis efisiensi belanja, dan analisis belanja per kapita. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja belanjanya dan melakukan perbaikan dalam perencanaan anggaran periode berikutnya.

Pemahaman yang komprehensif tentang konsep ini, beserta klasifikasi dan analisisnya, sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan belanja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, aplikasi konsep ini harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

2.1.2.2 Optimalisasi Belanja Daerah

Optimalisasi belanja daerah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Mardiasmo (2009) mendefinisikan optimalisasi belanja daerah sebagai proses pengelolaan pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Sjahrir et al. (2013) menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pola belanja daerah. Studi ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal telah mengubah komposisi belanja daerah, dengan peningkatan signifikan pada belanja sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, optimalisasi belanja daerah masih menghadapi tantangan seperti kapasitas kelembagaan yang terbatas dan politik anggaran. Pemahaman mendalam tentang konsep dan strategi optimalisasi belanja daerah sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan belanja yang efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.3 Hubungan Belanja Daerah dengan Pembangunan Ekonomi

Hubungan antara belanja daerah dan pembangunan ekonomi merupakan topik yang telah lama menjadi fokus dalam studi ekonomi publik dan pembangunan regional. Teori dasar yang menjelaskan hubungan ini dapat ditelusuri dari

pemikiran Keynes (1936) yang menekankan peran penting pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ekonomi daerah, belanja pemerintah daerah dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Musgrave dan Musgrave (1989) mengembangkan teori tentang fungsi ekonomi pemerintah yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam kerangka ini, belanja daerah memiliki peran strategis dalam mengalokasikan sumber daya untuk penyediaan barang dan jasa publik, mendistribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Implementasi fungsi-fungsi ini melalui belanja daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Efektivitas belanja daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi tergantung pada berbagai faktor, termasuk komposisi dan kualitas belanja, kapasitas kelembagaan, dan karakteristik ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan belanja yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas dan efektivitas belanja dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.3 Teori *Location Quotient*

Location Quotient merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan peranan suatu sektor/industri di suatu wilayah/kota terhadap peranan suatu sektor/industri di provinsi (Maulana et al., 2020). Analisis ini digunakan untuk menentukan basis ekonomi pada suatu daerah dan juga sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan dengan cara menilai tingkat konsentrasi relatif aktivitas ekonomi pada suatu sektor (Pribadi & Nurbiyanto, 2021). Dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$LQ = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV}$$

Dengan:

X_{ij} : PDRB sektor ke-i di wilayah analisis

X_i : PDRB sektor ke-i di wilayah referensi

RV_j : Total PDRB di wilayah analisis

RV : Total PDRB di wilayah referensi

2.1.4 Teori Belanja Pembangunan

2.1.4.1 Pengertian dan Jenis Belanja Pembangunan

Belanja pembangunan merupakan komponen krusial dalam struktur pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), belanja pembangunan didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk investasi dalam aset fisik dan non-fisik yang memiliki manfaat jangka panjang.

Sejalan dengan itu, Suparmoko (2002) menjelaskan bahwa belanja pembangunan mencakup pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja pembangunan ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan sifatnya. Menurut Halim (2007), jenis-jenis belanja pembangunan meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa untuk pembangunan, serta belanja pemeliharaan yang bersifat fisik.

Sementara itu, Bastian (2006) mengklasifikasikan belanja pembangunan menjadi belanja langsung dan tidak langsung, di mana belanja langsung terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait secara langsung. Lebih lanjut, Mardiasmo (2009) menekankan pentingnya prinsip value for money dalam pelaksanaan belanja pembangunan, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks otonomi daerah, Saragih (2003) menyoroti bahwa belanja pembangunan daerah harus diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing, serta harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.

Adapun menurut Dumairy (1996), belanja pembangunan dapat dikelompokkan menjadi pembangunan fisik dan non-fisik, di mana pembangunan fisik meliputi infrastruktur dan fasilitas publik, sementara pembangunan non-fisik mencakup pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Penyusunan anggaran belanja pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2002), harus memperhatikan skala prioritas dan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.

2.1.4.2 Hubungan Belanja Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus penelitian dalam literatur ekonomi pembangunan selama beberapa dekade. Teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) menekankan peran penting investasi publik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, belanja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk investasi publik yang berpotensi meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Easterly dan Rebelo (1993) dalam penelitian mereka yang berjudul "*Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation*" menemukan bukti empiris yang kuat bahwa investasi publik dalam transportasi dan komunikasi memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa belanja pembangunan yang ditargetkan pada sektor-sektor strategis dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

Aschauer (1989) dalam karyanya "*Is Public Expenditure Productive?*" mengemukakan bahwa investasi publik dalam infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sistem air memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi agregat. Studi ini menjadi landasan penting bagi penelitian selanjutnya yang mengeksplorasi hubungan antara belanja pembangunan dan kinerja ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, studi yang dilakukan oleh Sodik (2007) yang berjudul "*Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*" menunjukkan adanya hubungan positif antara pengeluaran pembangunan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini memperkuat argumen bahwa belanja pembangunan yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.

Meskipun sebagian besar studi menunjukkan hubungan positif antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, penting untuk dicatat bahwa efektivitas belanja pembangunan juga bergantung pada faktor-faktor lain seperti kualitas institusi, tata kelola yang baik, dan kebijakan ekonomi makro yang mendukung. Sebagaimana dikemukakan oleh Tanzi dan Davoodi (1997) dalam

"*Corruption, Public Investment, and Growth*", korupsi dan inefisiensi dalam alokasi belanja publik dapat mengurangi dampak positif belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.5 Teori Daya Saing

Konsep daya saing telah menjadi fokus utama dalam studi ekonomi dan manajemen strategis selama beberapa dekade terakhir. Teori daya saing pada dasarnya berusaha menjelaskan mengapa beberapa negara, daerah, industri, atau perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain.

Salah satu kontribusi paling signifikan dalam teori daya saing berasal dari Michael Porter (1990) melalui karyanya "*The Competitive Advantage of Nations*". Porter mengembangkan model "*Diamond*" yang menjelaskan faktor-faktor yang menentukan daya saing nasional dan regional. Model ini terdiri dari empat determinan utama: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Porter menekankan bahwa daya saing tidak hanya ditentukan oleh keunggulan komparatif dalam faktor produksi, tetapi juga oleh lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan peningkatan produktivitas.

Teori daya saing juga berhubungan erat dengan konsep keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo (1817). Ricardo menjelaskan bahwa negara atau daerah akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan jika mereka mengkhususkan diri dalam produksi barang atau jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Meskipun teori ini awalnya dikembangkan untuk menjelaskan pola perdagangan internasional, konsepnya juga relevan untuk memahami daya saing regional dan sektoral.

World Economic Forum (WEF) telah mengembangkan *Global Competitiveness Index* (GCI) yang secara luas digunakan untuk mengukur dan membandingkan daya saing nasional. Schwab (2018) menjelaskan bahwa GCI 4.0 mengintegrasikan aspek-aspek Revolusi Industri 4.0 ke dalam pengukuran daya saing, termasuk inovasi, fleksibilitas, dan ketahanan ekonomi.

Dalam perkembangan terbaru, teori daya saing semakin memasukkan aspek keberlanjutan dan inklusivitas. Porter dan Kramer (2011) memperkenalkan konsep

"*Creating Shared Value*" yang menekankan bahwa daya saing bisnis dan kesejahteraan sosial saling terkait. Mereka berargumen bahwa perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka sambil secara bersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Kesimpulannya, teori daya saing telah berkembang dari fokus awal pada keunggulan komparatif dan faktor produksi tradisional menjadi pemahaman yang lebih kompleks dan multidimensi. Daya saing kini dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara berbagai faktor, termasuk inovasi, kapabilitas teknologi, kualitas institusi, modal manusia dan sosial, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam konteks pembangunan regional dan sektoral, pemahaman komprehensif tentang teori daya saing ini sangat penting untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.1 Daya Saing Sektor Unggulan

Konsep daya saing sektor unggulan merupakan aspek krusial dalam pengembangan ekonomi regional dan nasional. Sektor unggulan, sebagaimana didefinisikan oleh Arsyad (2010), merujuk pada sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan sektor lain dalam suatu wilayah. Konsep ini berakar pada teori basis ekonomi yang dikembangkan oleh Tiebout (1956), yang membedakan antara sektor basis (berorientasi ekspor) dan sektor non-basis dalam struktur ekonomi suatu wilayah.

Identifikasi sektor unggulan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya meningkatkan daya saing regional. Blakely dan Bradshaw (2002) mengemukakan beberapa metode untuk mengidentifikasi sektor unggulan, termasuk analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, *Input-Output*, dan *SWOT*. Metode-metode ini memungkinkan para pembuat kebijakan dan perencana ekonomi untuk memahami struktur ekonomi wilayah dan mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Kitson et al. (2004) memperluas pemahaman tentang daya saing regional dengan mengidentifikasi enam jenis modal yang mempengaruhi daya saing: modal produktif, modal manusia, modal sosial-institusional, modal budaya, modal infrastruktur, dan modal pengetahuan/kreativitas. Pendekatan ini menekankan

bahwa daya saing sektor unggulan tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi tradisional, tetapi juga oleh aspek-aspek sosial, budaya, dan institusional yang lebih luas.

Pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan diperlukan untuk mengembangkan sektor unggulan yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis.

2.1.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Daya Saing Daerah

Daya saing daerah telah menjadi fokus utama dalam studi pembangunan ekonomi regional. Konsep ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Berbagai teori dan studi empiris telah mengidentifikasi beragam faktor yang mempengaruhi daya saing daerah.

Michael Porter (1990) dalam karyanya "*The Competitive Advantage of Nations*" menyajikan kerangka komprehensif untuk memahami daya saing, yang kemudian diadaptasi untuk konteks regional. Porter mengidentifikasi empat faktor utama yang membentuk "*Diamond Model*" daya saing: kondisi faktor, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi perusahaan, struktur, dan persaingan. Model ini menekankan bahwa daya saing daerah tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam atau tenaga kerja murah, tetapi juga pada lingkungan bisnis yang mendukung inovasi dan produktivitas.

Lebih lanjut, Kitson et al. (2004) memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing daerah dengan mengidentifikasi enam jenis modal: produktif, manusia, sosial-institusional, budaya, infrastruktur, dan pengetahuan/kreativitas. Pendekatan ini menekankan pentingnya aspek-aspek non-ekonomi dalam membentuk daya saing daerah.

2.1.6 Teori Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan dua konsep penting dalam studi pemerintahan dan administrasi publik yang berfokus pada pembagian kekuasaan dan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah mengacu pada pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Desentralisasi fiskal, di sisi lain, melibatkan transfer kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kedua konsep ini saling berkaitan dan dianggap penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang lebih responsif dan transparan. Beberapa teori dan pandangan akademis, seperti yang dikemukakan oleh Oates (1972), Musgrave (1959), dan Rondinelli (1989), memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika dan implementasi otonomi daerah serta desentralisasi fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia.

2.1.6.1 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan konsep krusial dalam tata kelola pemerintahan modern, terutama di negara-negara dengan wilayah yang luas dan beragam seperti Indonesia. Konsep ini mengacu pada pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan.

Rondinelli dan Cheema (1983) mendefinisikan desentralisasi, yang merupakan dasar dari otonomi daerah, sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi lapangannya, unit-unit administratif lokal, organisasi semi-otonom dan parastatal, pemerintahan daerah, atau organisasi non-pemerintah. Mereka mengidentifikasi empat bentuk desentralisasi: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi.

Tiebout (1956) dalam model "*voting with feet*"-nya mengemukakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya melalui persaingan antar daerah. Ini mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik dan memberi warga pilihan untuk pindah ke daerah yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

Aspek fiskal dari otonomi daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Brojonegoro (2001) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional dan mendorong kompetisi antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Meskipun demikian, implementasi otonomi daerah di Indonesia tidak tanpa tantangan. Seperti yang diidentifikasi oleh Smoke (2001), tantangan-tantangan ini termasuk kapasitas administratif yang terbatas, ketimpangan fiskal antar daerah, dan potensi konflik antara pemerintah pusat dan daerah.

Kesimpulannya, konsep otonomi daerah merupakan pendekatan tata kelola yang kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengakomodasi keragaman lokal. Implementasinya memerlukan keseimbangan antara kewenangan daerah dan kepentingan nasional, serta membutuhkan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan di tingkat lokal.

2.1.6.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen krusial dalam implementasi otonomi daerah dan merupakan aspek penting dari reformasi tata kelola pemerintahan di banyak negara. Konsep ini mengacu pada transfer kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mencakup aspek pendapatan, pengeluaran, dan manajemen keuangan.

Oates (1972) dalam karyanya yang monumental "*Fiscal Federalism*" meletakkan dasar teoretis untuk desentralisasi fiskal. Ia mengemukakan "Teorema Desentralisasi" yang menyatakan bahwa penyediaan barang publik akan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan lokal. Teori ini menjadi landasan utama bagi argumen ekonomi untuk desentralisasi fiskal.

Musgrave (1959) sebelumnya telah mengidentifikasi tiga fungsi utama kebijakan fiskal pemerintah: alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks desentralisasi fiskal, fungsi alokasi dianggap paling tepat untuk dilimpahkan ke tingkat daerah, sementara fungsi distribusi dan stabilisasi umumnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Aspek penting lainnya dari desentralisasi fiskal adalah pengelolaan utang daerah. Ter-Minassian dan Craig (1997) menganalisis berbagai pendekatan untuk mengontrol pinjaman pemerintah daerah dan menekankan pentingnya disiplin pasar dan aturan fiskal yang jelas untuk mencegah akumulasi utang yang tidak berkelanjutan.

Kesimpulannya, desentralisasi fiskal merupakan konsep yang kompleks yang melibatkan transfer kewenangan fiskal dari pusat ke daerah. Implementasinya memerlukan desain kelembagaan yang hati-hati, pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Meskipun berpotensi meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, desentralisasi fiskal juga membawa risiko yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik.

2.1.6.3 Implikasi terhadap Regulasi dan Belanja Daerah

Implikasi desentralisasi terhadap regulasi dan belanja daerah merupakan aspek krusial dalam implementasi otonomi daerah. Perubahan struktur pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik membawa konsekuensi signifikan terhadap proses pembuatan kebijakan dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Teori desentralisasi fiskal, sebagaimana dikemukakan oleh Oates (1972), menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memiliki informasi yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Implikasinya, pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan regulasi dan kemampuan pengelolaan belanja yang memadai untuk merespons kebutuhan spesifik daerahnya.

Dalam konteks regulasi, Bardhan dan Mookherjee (2006) menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan regulasi pusat dan daerah. Mereka berpendapat bahwa desentralisasi regulasi dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas, namun juga membawa risiko "race to the bottom" di mana daerah-daerah bersaing menurunkan standar regulasi untuk menarik investasi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi nasional yang menetapkan standar minimum dan mekanisme koordinasi antar daerah.

Smoke (2001) mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi desentralisasi regulasi, termasuk kapasitas teknis yang terbatas di tingkat daerah, potensi konflik kepentingan, dan kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Ia menekankan pentingnya pengembangan kapasitas berkelanjutan dan penguatan sistem checks and balances dalam proses pembuatan regulasi daerah.

Kesimpulannya, implikasi desentralisasi terhadap regulasi dan belanja daerah bersifat multidimensi dan kompleks. Desentralisasi membawa potensi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan, namun juga membawa tantangan dalam hal koordinasi, kapasitas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam merancang regulasi dan sistem pengelolaan belanja daerah yang mendukung tujuan desentralisasi sambil meminimalkan risiko-risiko potensial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Nilawati (2019)	Menentukan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membangun strategi aksi untuk meningkatkannya di Gunungkidul.	Metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	PAD Gunungkidul mengalami peningkatan signifikan, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah masih rendah.
Atmaji & Qodir (2021)	Mendeskripsikan implementasi kebijakan untuk meningkatkan destinasi wisata berbasis kearifan lokal di Gunungkidul.	Studi literatur kualitatif dengan pengumpulan artikel dari berbagai sumber.	Kebijakan saat ini belum memprioritaskan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata.

Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Maryudi et al. (2015)	Menganalisis bagaimana kerangka regulasi mempengaruhi daya saing perkebunan kecil di Gunungkidul.	Studi kasus dengan analisis kualitatif dan wawancara mendalam.	Kerangka regulasi yang kompleks menghadirkan tantangan signifikan bagi petani kecil untuk mengakses pasar komersial.
Setiawan & Erison (2023)	Mengkaji peran pengeluaran pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan berbasis perempuan di Gunungkidul.	Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.	Tingkat kesejahteraan yang rendah berkorelasi dengan kondisi perempuan yang lemah dalam anggaran pembangunan.
Aristanto (2019)	Menganalisis hubungan antara kapasitas fiskal dan pengeluaran APBD dengan penyaluran KUR di Jawa Timur.	Metode campuran dengan survei kuantitatif dan studi kasus kualitatif.	Kapasitas fiskal dan pengeluaran APBD tidak berpengaruh signifikan terhadap sosialisasi dan pendampingan KUR.
Wu et al. (2020)	Meneliti dampak desentralisasi lingkungan dan kompetisi pemerintah lokal terhadap pengembangan hijau regional di China.	Model SBM-undesirable dan model PVAR dengan data panel dari 30 provinsi di China.	Desentralisasi lingkungan memiliki dampak positif dan negatif pada pengembangan hijau regional, tergantung pada tingkat kompetisi pemerintah lokal.

Peneliti dan Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wenjuan & Zhao (2023)	Mengeksplorasi hubungan antara kompetisi fiskal dan investasi jangka panjang dalam inovasi di tingkat pemerintah lokal.	Analisis data panel dengan regresi efek tetap.	Kompetisi fiskal mengalihkan sumber daya dari investasi inovasi penting, menunjukkan kebutuhan akan kerangka kebijakan yang seimbang.

Berdasarkan penelitian-penelitian ini, jelas bahwa regulasi dan kebijakan fiskal pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam menentukan daya saing dan kesejahteraan regional. Studi-studi tersebut memberikan dasar kuat untuk mengevaluasi bagaimana optimalisasi belanja daerah di Gunungkidul dapat meningkatkan daya saing sektor unggulan.

2.3 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah guna meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Landasan teori penelitian ini melibatkan integrasi konsep otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan teori daya saing.

Kabupaten Gunungkidul, sebagai salah satu daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki potensi sektor unggulan yang signifikan, terutama di bidang pariwisata, pertanian, dan perikanan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran daerah dan infrastruktur yang belum memadai. Data BPS Kabupaten Gunungkidul (2023) menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) setiap tahun, anggaran belanja daerah masih belum optimal dalam mendukung sektor-sektor unggulan.

Salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya belanja daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul yang berada di angka 70,81 pada tahun 2022, di bawah rata-rata nasional yang sebesar 72,29 (BPS, 2023). Selain itu, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 17,62% pada tahun 2022, dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada di angka 9,22%

(BPS, 2023). Kondisi ini menuntut adanya regulasi dan kebijakan belanja daerah yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal secara mandiri. Desentralisasi fiskal, Seperti yang dipaparkan oleh Oates dalam bukunya yang berjudul “*Fiscal Federalism*”, memaparkan bagian dari otonomi daerah, memungkinkan distribusi sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, sehingga meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan (Oates, 1972). Otonomi ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan relevansi dan efisiensi regulasi lokal (Rachmad et al., 2023).

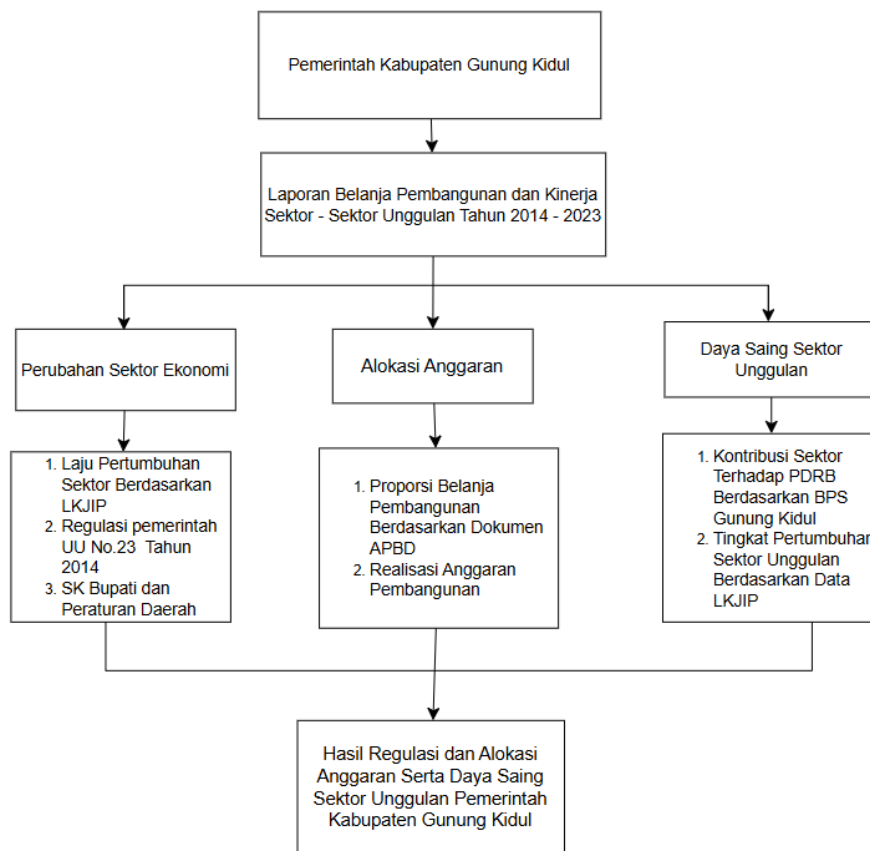
Dalam buku “*Fiscal Decentralization in Developing Countries*”, desentralisasi fiskal memungkinkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif, memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan belanja publik dengan prioritas lokal (Bird & Vaillancourt, 1998). Dengan kontrol yang lebih besar atas anggaran, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Atthahara, 2018). Namun, ini juga memerlukan sistem transfer fiskal yang tepat untuk mengatasi ketidakseimbangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil di seluruh wilayah (Khusaini, 2018).

Daya saing daerah ditentukan oleh empat faktor utama dalam *model Diamond Porter*: kondisi faktor produksi, kondisi permintaan, industri terkait dan pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (Porter, 1990). Daerah yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif melalui inovasi, peningkatan produktivitas, dan lingkungan bisnis yang mendukung akan lebih kompetitif (Nelson & Winter, 1982).

Regulasi yang efektif dari pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, inovasi, dan pengembangan sektor unggulan. Kebijakan yang mendukung daya saing dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, insentif fiskal, dan perlindungan terhadap hak-hak bisnis (Purba et al., 2023). Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program dan proyek yang langsung mendukung sektor unggulan, seperti peningkatan kapasitas

sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan promosi produk lokal (Zein & Septiani, 2024). Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran, yang meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat (Masitha & Mulyadi, 2024).

Berikut merupakan gambaran kerangka berpikir dalam menelaah peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah di Gunungkidul yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir yang ada, berikut adalah tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

1. Memulai dengan mengkaji berbagai referensi terkait sektor unggulan, pengeluaran pembangunan, dan investasi swasta
2. Menentukan Lokasi Penelitian yaitu Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian berdasarkan potensi serta tantangan ekonominya.
3. Pengumpulan data terkait pertumbuhan ekonomi, investasi, serta pengeluaran pembangunan.

4. Dilakukan analisis *location quotient* untuk mengetahui sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan wilayah Gunungkidul.
5. Berdasarkan hasil analisis *location quotient*, peneliti menentukan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
6. Kemudian melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antara sektor unggulan dengan variabel lainnya.
7. Setelah itu, mengkaji hubungan antara sektor unggulan, PDRB, belanja pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memahami pengaruh dengan variabel lainnya secara mendalam.
8. Mengidentifikasi kebutuhan untuk menciptakan sinergi antara regulasi, belanja pemerintah, dan daya saing sektor unggulan.
9. Setelah itu, mengevaluasi hasil analisis dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul.

Kerangka berpikir ini mengintegrasikan teori otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan daya saing untuk memahami bagaimana regulasi dan belanja daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan memahami interaksi antara regulasi dan belanja daerah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor unggulan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam rangka menelaah "Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul" termasuk dalam jenis penelitian

kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan akurat, serta menganalisis hubungan antara variabel yang terlibat secara objektif menggunakan data numerik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam pendekatan kuantitatif, peneliti melakukan perhitungan *location quotient* selama periode 2014-2023 untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di Gunungkidul. Selain itu, hasil dari perhitungan *location quotient* ini kemudian dikorelasikan dengan belanja pembangunan dari struktur APBD Kabupaten Gunungkidul. Teori belanja pembangunan mengacu pada konsep bahwa pengeluaran pemerintah diarahkan untuk investasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (Musgrave & Musgrave, 1989).

Sebagai pendukung, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terkait dengan regulasi dan kebijakan pembangunan di Gunungkidul. Selain itu, analisis dokumen, seperti regulasi daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dilakukan untuk memahami sejauh mana peran pemerintah dalam mendukung sektor unggulan di Gunungkidul. Pendekatan ini memberikan konteks yang lebih dalam dan mengungkap bagaimana kebijakan dan regulasi mempengaruhi daya saing daerah (Moleong, 2017).

Dengan pendekatan kuantitatif sebagai fokus utama dan wawancara sebagai pendukung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan terukur mengenai hubungan antara regulasi pemerintah daerah, optimalisasi belanja daerah, dan peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah 1.485,36 km² dan terletak di bagian tenggara Provinsi DIY, berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jawa Tengah) di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Bantul dan Sleman di sebelah barat (BPS Kabupaten Gunungkidul, 2022).

Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Wonosari. Topografi wilayah Gunungkidul didominasi oleh perbukitan karst, yang memberikan karakteristik unik pada lanskap dan potensi ekonominya (Haryono & Day, 2004).

Pemilihan Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1. Karakteristik Ekonomi: Gunungkidul memiliki struktur ekonomi yang unik dengan sektor pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah sebagai penggerak utama. Hal ini menarik untuk diteliti dari perspektif optimalisasi belanja daerah dan peningkatan daya saing (BPS, 2023).
2. Dinamika Regulasi: Sebagai daerah otonom, Gunungkidul memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengimplementasikan regulasi daerah. Dinamika ini menarik untuk dikaji dalam konteks pengaruhnya terhadap belanja daerah dan pengembangan sektor unggulan (BPS, 2023).
3. Potensi Sektor Unggulan: Kabupaten ini memiliki beberapa sektor unggulan yang potensial, seperti pariwisata pantai, pertanian organik, dan industri kerajinan. Analisis terhadap regulasi yang mendukung pengembangan sektor-sektor ini dapat memberikan wawasan berharga (Sugiarto & Santoso, 2019).
4. Aksesibilitas Data: Sebagai bagian dari Provinsi DIY, Gunungkidul memiliki sistem tata kelola yang relatif baik, yang memungkinkan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian (Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2023).

Dengan memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai lokasi penelitian, diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja dan peningkatan daya saing sektor unggulan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan kontekstual.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yang berjudul "Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul," data yang digunakan terdiri dari dua jenis utama:

1. Data Kuantitatif

- Data *Location Quotient*: Data ini mencakup analisis selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2023 yang mencerminkan perubahan dan dinamika sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Gunungkidul. Data *location quotient* diambil dari laporan resmi seperti data BPS dan dokumen ekonomi daerah yang menggambarkan kontribusi sektor-sektor tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
- Data Belanja Pembangunan: Data ini meliputi struktur belanja pembangunan dalam APBD Kabupaten Gunungkidul, yang akan dianalisis dan dikorelasikan dengan hasil *location quotient* untuk menilai efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan. Sumber data ini berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk dokumen APBD dan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

2. Data Kualitatif

- Regulasi Pemerintah: Data mengenai kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Sumber data ini berasal dari peraturan daerah, SK Bupati, dan dokumen kebijakan lainnya.
- Wawancara: Wawancara dilakukan dengan pejabat daerah dan pihak-pihak terkait yang memahami regulasi dan implementasi kebijakan yang mempengaruhi sektor unggulan di Gunungkidul. Data ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja pembangunan.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Badan Pusat Statistik (BPS): Sumber utama untuk data kuantitatif mengenai pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, dan data lainnya yang relevan untuk analisis *location quotient*.
2. Dokumen APBD dan LKJIP Kabupaten Gunungkidul: Menyediakan data belanja pembangunan dan laporan kinerja sektor-sektor unggulan.
3. Dokumen Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah: Termasuk Peraturan Daerah, SK Bupati, dan kebijakan lain yang relevan.
4. Wawancara dengan Pejabat Daerah: Sumber data kualitatif mengenai implementasi regulasi dan strategi optimalisasi belanja daerah.

Berikut adalah tabel operasional data yang menunjukkan jenis data, sumber, dan metode pengumpulannya (Creswell & Creswell, 2018; Yin, 2018):

Tabel 3.1 Operasional Data Penelitian

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
Perubahan Sektor Ekonomi	Perubahan yang terjadi pada sektor-sektor ekonomi di Gunungkidul selama periode 2014-2023	- Laju Pertumbuhan Sektor	BPS, Dokumen APBD, LKJIP	Analisis Data Sekunder	Analisis <i>Location Quotient</i>
Belanja Pembangunan	Alokasi anggaran pembangunan daerah dalam struktur APBD yang digunakan untuk mendukung sektor unggulan selama periode 2014-2023.	- Proporsi Belanja Pembangunan - Realisasi Anggaran Pembangunan	Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul	Analisis Data Sekunder	Korelasi <i>Location Quotient</i> dengan Belanja Pembangunan
Regulasi Pemerintah Daerah	Peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung sektor unggulan dan mengoptimalkan belanja pembangunan.	- Regulasi yang Mendukung Sektor Unggulan	Dokumen Kebijakan Daerah, SK Bupati, Peraturan Daerah	Dokumentasi, Wawancara	Analisis Kualitatif
Daya Saing Sektor Unggulan	Kemampuan sektor-sektor tertentu untuk bersaing dan berkontribusi pada	- Kontribusi Sektor Terhadap PDRB - Tingkat Pertumbuhan	BPS, LKJIP	Analisis Data Sekunder, Wawancara	Analisis Deskriptif dan Korelasi

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
	pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2014-2023	Sektor Unggulan			

Tabel ini menguraikan variabel yang diteliti, definisi operasional, indikator yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait peran regulasi pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah dan peningkatan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis *location quotient*, korelasi dengan belanja pembangunan, dan evaluasi peran pemerintah dengan pendekatan kuantitatif sebagai metode utama serta wawancara sebagai pendukung.

1. Instrumen Pengumpulan Data Sekunder:
 - a. Lembar Pengumpulan Data Ekonomi Regional:
 - Tujuan: Mengumpulkan data PDRB sektoral Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - Isi: Tabel matriks dengan kolom sektor ekonomi dan baris tahun (10 tahun terakhir).
 - Sumber data: BPS Kabupaten Gunungkidul dan BPS Provinsi D.I. Yogyakarta.
 - b. Lembar Rekapitulasi Belanja Pembangunan:
 - Tujuan: Mengumpulkan data alokasi dan realisasi belanja pembangunan per sektor.
 - Isi: Tabel dengan kolom sektor, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran untuk 10 tahun terakhir.
 - Sumber data: Dokumen APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul.

2. Panduan Dokumentasi Regulasi:

- Tujuan: Mengidentifikasi dan menganalisis regulasi terkait pengembangan sektor unggulan.
- Isi: a) Daftar regulasi (Perda, Perbup, SK Bupati) terkait pengembangan ekonomi daerah. b) Matriks analisis isi regulasi dengan kolom: nomor regulasi, tahun, sektor yang diatur, tujuan regulasi, dan poin-poin kunci.
- Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah, website resmi Pemda Gunungkidul.

3. Panduan Wawancara Semi-Terstruktur:

Pejabat Pengampu Perangkat Daerah Sektor Unggulan di Bappeda Gunungkidul:

- Tujuan: Menggali informasi tentang implementasi regulasi dan strategi pengembangan sektor unggulan.
- Isi: Pertanyaan terkait:
 - Proses identifikasi dan penentuan sektor unggulan
 - Mekanisme penyusunan regulasi pendukung
 - Strategi alokasi belanja pembangunan untuk sektor unggulan
 - Tantangan dalam implementasi regulasi
 - Evaluasi dampak regulasi terhadap pertumbuhan sektor unggulan

4. Lembar Observasi Lapangan:

- Tujuan: Mengamati implementasi program dan dampak regulasi di lapangan.
- Isi: a) Checklist infrastruktur pendukung sektor unggulan b) Catatan tentang aktivitas ekonomi di sektor unggulan c) Dokumentasi visual (foto/video) kondisi lapangan

5. Matriks Evaluasi Kebijakan:

- Tujuan: Mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, implementasi, dan dampak terhadap sektor unggulan.
- Isi: Tabel dengan kolom: a) Regulasi/kebijakan b) Tujuan kebijakan c) Implementasi (skala 1-5) d) Dampak terhadap sektor unggulan (skala 1-5) e) Catatan evaluasi

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif yang komprehensif dengan wawancara sebagai data pendukung, guna meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan variabel penelitian yang telah dipaparkan di atas, teknik pengumpulan data untuk penelitian "Peran Regulasi Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul" dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis Data Sekunder

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait perubahan sektor ekonomi, belanja pembangunan, dan daya saing sektor unggulan. Menurut Sugiyono (2015), analisis data sekunder melibatkan pengumpulan data yang telah tersedia dalam publikasi statistik dan laporan instansi terkait. Dalam konteks penelitian ini, sumber data sekunder meliputi: a) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul: Data PDRB, laju pertumbuhan sektor, dan kontribusi sektor terhadap PDRB. b) Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Informasi tentang alokasi dan realisasi belanja pembangunan. c) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP): Data kinerja sektor-sektor ekonomi dan capaian pembangunan daerah. Creswell (2014) menekankan bahwa analisis data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses data dalam jumlah besar dengan efisien, yang sangat bermanfaat untuk analisis tren dan pola pertumbuhan ekonomi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait regulasi pemerintah daerah. Arikunto (2010) mendefinisikan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumentasi meliputi: a) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul b) Surat Keputusan (SK) Bupati c) Dokumen kebijakan daerah lainnya yang relevan dengan pengembangan sektor unggulan

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi lebih mendalam tentang implementasi regulasi, strategi pengembangan sektor unggulan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing sektor unggulan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan pejabat-pejabat yang mengkoordinir perangkat daerah sektor unggulan. Patton (2002) menyarankan penggunaan wawancara semi-terstruktur untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi sambil tetap menjaga fokus pada topik penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis *Location Quotient*

Analisis *location quotient* (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan basis ekonomi pada suatu daerah. Analisis LQ digunakan untuk sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan dengan cara menilai tingkat konsentrasi relatif aktivitas ekonomi pada suatu sektor (Pribadi & Nurbianto, 2021). Dihitung dengan menggunakan persamaan:

$$LQ = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV}$$

Dengan:

X_{ij} : PDRB sektor ke-i di wilayah analisis

X_i : PDRB sektor ke-i di wilayah referensi

RV_j : Total PDRB di wilayah analisis

RV : Total PDRB di wilayah referensi

3.6.2 Korelasi Pearson

Analisis ini dilakukan untuk melihat hubungan antara sektor-sektor unggulan dan berkembang yang telah ditentukan melalui analisis *location quotient* di Kabupaten Gunungkidul pada PDRB, belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan penduduk. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$r = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\Sigma(x_i - \bar{x})^2 \Sigma(y_i - \bar{y})^2}}$$

Dengan:

r : Koefisien korelasi

x_i : Nilai pada variabel x observasi ke-i

\bar{x} : Nilai rata-rata pada variabel x

y_i : Nilai pada variabel y observasi ke-i

\bar{y} : Nilai rata-rata pada variabel y

Interpretasi hasil korelasi akan mengikuti panduan dari Evans (1996), yang memberikan klasifikasi kekuatan hubungan berdasarkan nilai koefisien korelasi.

3.6.3 Uji t untuk Korelasi Pearson

Korelasi hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan linear antara kedua variabel, tetapi belum menjelaskan apakah hubungan tersebut cukup berarti secara statistik. Dengan kata lain, korelasi yang diperoleh mungkin hanya terjadi karena kebetulan dari sampel data yang dianalisis atau mencerminkan hubungan nyata antara variabel.

Untuk menguji signifikansi korelasi ini, digunakan uji t. Uji t bertujuan untuk menentukan apakah nilai korelasi yang dihasilkan signifikan pada tingkat probabilitas tertentu, biasanya 5% atau 0,05 dan derajat bebas sebesar $n - 2$. Jika hasil uji t menunjukkan bahwa korelasi tersebut signifikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan antara belanja pembangunan dan sektor unggulan tidak terjadi secara kebetulan. Uji t untuk korelasi menggunakan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dengan:

- t : Nilai hasil pengujian
- r : Koefisien korelasi
- n : Panjang data

Rumus ini mengevaluasi apakah koefisien korelasi yang dihitung cukup besar untuk menunjukkan adanya hubungan nyata antara kedua variabel, atau apakah hasil tersebut hanya kebetulan dari data yang dianalisis.

3.6.4 Evaluasi Peran Pemerintah dengan Bukti Empiris

Evaluasi peran pemerintah daerah akan dilakukan melalui analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Kondensasi Data: proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mentransformasikan data yang muncul dalam korpus penuh dari catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

2. Penyajian Data: penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: penarikan makna dari data yang ditampilkan.

Dalam konteks penelitian ini, analisis akan berfokus pada:

1. Kesesuaian antara regulasi yang ada dengan kebutuhan pengembangan sektor unggulan.
2. Efektivitas implementasi regulasi dalam mendukung optimalisasi belanja daerah.
3. Tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi dan optimalisasi belanja daerah.
4. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan.

Hasil analisis ini akan memberikan bukti empiris tentang peran pemerintah daerah dalam optimalisasi belanja daerah untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis *Location Quotient*

Analisis LQ dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor basis, yaitu sektor yang memiliki kontribusi lebih besar di tingkat kabupaten dibandingkan di tingkat provinsi, yang mencerminkan potensi sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2014-2023 dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Location Quotient

Sektor PDRB	Rata-Rata LQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.424
Pertambangan dan Penggalian	2.528
Industri Pengolahan	0.731
Pengadaan Listrik dan Gas	0.725
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.573
Konstruksi	0.964
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.147
Transportasi dan Pergudangan	0.978
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.620
Informasi dan Komunikasi	0.950
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.573
Real Estate	0.504
Jasa Perusahaan	0.456
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.146
Jasa Pendidikan	0.770
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.832
Jasa Lainnya	1.389

Hasil perhitungan *location quotient* (LQ) di atas merupakan nilai rata-rata dari nilai LQ yang dihitung setiap tahun mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2023.

Secara umum, interpretasi untuk nilai LQ dibagi menjadi 2, yaitu ketika $LQ > 1$ menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis, yang memiliki keunggulan komparatif dan potensi untuk dikembangkan sebagai pendorong utama ekonomi daerah dan ketika $LQ < 1$ menandakan bahwa sektor tersebut merupakan sektor non-basis, yang perannya dalam perekonomian lokal masih relatif kecil dibandingkan dengan wilayah acuan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.1** diperoleh sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan berperan sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat digolongkan sebagai sektor unggulan.

4.2 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan belanja pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.2 Korelasi antara PDRB dan Belanja Pembangunan

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.749	3.193	0.013
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.926	6.912	0.000
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.658	2.475	0.038
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.855	4.661	0.002
Jasa lainnya	0.851	4.590	0.002

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,749 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan

bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Menurut Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Gunungkidul, Sugeng Prihartanto, menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan, Pemerintah Daerah juga telah menyusun regulasi pendukung melalui mekanisme yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan. Sugeng menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, legislatif, serta masyarakat melalui forum konsultasi publik. Regulasi yang disusun difokuskan untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, memperkuat kelembagaan petani, serta menyediakan kerangka insentif yang mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Terkait dengan strategi alokasi belanja pembangunan, ditegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah berbasis kinerja dan tematik. Alokasi anggaran diarahkan pada kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap peningkatan produktivitas sektor unggulan, seperti pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan sarana produksi, penguatan kapasitas SDM petani, serta program hilirisasi produk. Selain menggunakan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga secara aktif mengoptimalkan pendanaan dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) tematik untuk pertanian dan perikanan. Dalam implementasinya terdapat sejumlah tantangan antara lain adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat belanja pembangunan pada sektor ini. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas sektor tersebut didominasi oleh pihak

swasta dan berada di luar cakupan intervensi fiskal pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, Jadi Markuat, pejabat yang membidangi infrastruktur dan pengembangan wilayah di Bappeda Gunungkidul, menjelaskan bahwa meskipun sektor ini memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah, pengelolaannya bersifat terbatas dari sisi kewenangan. . Secara regulasi, kewenangan untuk perizinan dan pengawasan teknis sektor pertambangan sudah sepenuhnya berada di tingkat provinsi, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral. Lebih lanjut, pemerintah kabupaten hanya memiliki peran dalam aspek perencanaan ruang dan pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan tambang yang berada dalam wilayahnya. Dalam hal ini, acuan utama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang mengatur zona kawasan yang diizinkan dan dibatasi untuk kegiatan pertambangan. Sebagai bagian dari pengelolaan ruang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki peran dalam memberikan rekomendasi teknis lokasi dan mempertimbangkan kesesuaian rencana kegiatan tambang terhadap peruntukan ruang. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemda DIY dalam menerbitkan izin atau melakukan pengawasan.

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, nilai korelasi sebesar 0,926 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Menurut Jadi Markuat selaku pejabat terkait, dalam proses penyusunan regulasi pendukung, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menerbitkan beberapa peraturan terkait sektor terkait, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan lintas

perangkat daerah. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara kolaboratif. Strategi alokasi belanja pembangunan diprioritaskan untuk memperkuat infrastruktur dasar dan layanan publik yang berkaitan langsung dengan sektor ini. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jaringan distribusi air bersih, peningkatan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA), penyediaan fasilitas daur ulang, serta pembangunan instalasi pengolahan limbah cair. Dalam implementasi regulasi di sektor ini, masih dihadapi sejumlah tantangan, diantaranya adalah keterbatasan kapasitas teknis operator di lapangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, serta belum optimalnya sinergi antara sektor pemerintah dan swasta dalam pengelolaan limbah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga menghadapi tantangan geografis, terutama dalam distribusi air bersih ke wilayah perbukitan dan daerah rawan kekeringan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten terus mendorong inovasi teknologi dan skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar 0,658 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Menurut Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Gunungkidul, Sugeng Prihartanto, dukungan untuk sektor unggulan ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yang secara eksplisit menempatkan sektor perdagangan sebagai prioritas pembangunan ekonomi daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa penguatan

sektor perdagangan diarahkan pada revitalisasi pasar tradisional, pengembangan sistem logistik, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil. Lebih lanjut, dalam mendukung pertumbuhan sektor ini, Pemerintah Daerah juga menyusun regulasi pendukung yang relevan. Mekanisme penyusunan regulasi dilakukan melalui proses koordinasi lintas OPD dan konsultasi publik. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPT Pengelolaan Pasar, yang memberikan kerangka hukum untuk peningkatan kualitas sarana perdagangan, pengelolaan yang profesional, serta pemberdayaan pedagang. Dalam hal penganggaran, ditekankan bahwa strategi alokasi belanja pembangunan diarahkan pada program-program dengan dampak ekonomi yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan kegiatan seperti revitalisasi pasar, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi dan UMKM, serta pembangunan akses jalan menuju pusat perdagangan. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung transformasi digital UMKM lokal melalui kerja sama dengan platform e-commerce dan pelatihan literasi digital,” paparnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip tematik, holistik, dan integratif sebagaimana diatur dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, nilai korelasi sebesar 0,855 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kartini, Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan Bappeda Gunungkidul, dijelaskan bahwa Regulasi pendukung untuk sektor ini dirancang melalui mekanisme kolaboratif lintas perangkat daerah, dengan landasan utama yang termuat dalam dokumen RPJMD maupun RKPD, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi, perluasan cakupan perlindungan sosial, dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa. Selain

itu, ditegaskan bahwa adanya dukungan dari regulasi teknis, khususnya Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 99 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 2020-2024, yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Terkait strategi alokasi belanja pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk penguatan pelayanan publik berbasis digital, pembangunan infrastruktur perkantoran, serta pengembangan sistem jaminan sosial daerah. Alokasi belanja langsung juga diprioritaskan untuk program seperti penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, integrasi layanan kependudukan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Belanja tersebut juga diarahkan untuk mendukung target-target kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun implementasi regulasi menghadapi sejumlah tantangan diantaranya dalam hal pemerataan kualitas pelayanan antarwilayah dan keterbatasan SDM, serta resistensi terhadap perubahan sistem digital. Selain itu, penguatan jaminan sosial juga menghadapi tantangan pendataan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,851 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan belanja pembangunan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Menurut Sugeng Prihartanto, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengatur pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, pemerintah juga mengatur Kawasan Pariwisata melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Pariwisata Siung-Wediombo. Selain itu, dukungan untuk UMKM sektor jasa lainnya

diberikan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul 2023-2043, yang mencakup industri unggulan. Belanja pembangunan yang berkontribusi pada sektor jasa lainnya mencerminkan potensi besar sektor ini dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal, terutama melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan lebih lanjut, seperti promosi wisata lokal dan peningkatan fasilitas umum, akan meningkatkan kontribusi sektor ini.

4.3 Hubungan antara Investasi Swasta dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan investasi swasta di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.3 Korelasi antara PDRB dan Investasi Swasta

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.675	2.589	0.032
Pertambangan dan Penggalian	0.275	0.808	0.443
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.719	2.926	0.019
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
Jasa lainnya	0.134	0.384	0.711

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,675 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa investasi yang disalurkan seperti perbaikan infrastruktur produksi dan pemasaran serta kemudahan akses dalam mengadaptasi teknologi dan metode modern mendorong produktivitas dan nilai tambah sektor ini.

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,275 menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara PDRB dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa investasi belum dapat dirasakan dampaknya pada sektor ini, tetapi harus bergantung pada investasi dikarenakan tidak terdapat belanja pemerintah untuk sektor ini. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat sektor pertambangan yang padat modal namun minim penyerapan tenaga kerja lokal, serta aktivitas ekonomi yang sering kali terpusat pada eksploitasi sumber daya tanpa keterkaitan kuat dengan sektor-sektor produktif lain di daerah.
3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini kurang mampu untuk menarik investor swasta.
4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar 0,719 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Sektor ini memiliki karakteristik yang sangat responsif terhadap daya beli dan mobilitas masyarakat, sehingga setiap dorongan investasi cenderung cepat berkontribusi terhadap peningkatan volume transaksi dan perputaran barang dan jasa yang menyebabkan sektor ini sangat sensitif terhadap dukungan investasi.
5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini dapat dianggap wajar karena sektor ini tidak tumbuh melalui investasi swasta, tetapi melalui belanja pemerintah.
6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,134 menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara PDRB dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari

0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa investasi swasta tidak memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan PDRB di sektor ini, kemungkinan karena sifat sektor jasa lainnya yang sangat heterogen sehingga investasi swasta menyebar tanpa dampak langsung yang jelas terhadap output ekonomi.

4.4 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.4 Korelasi antara PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.534	1.787	0.112
Pertambangan dan Penggalian	0.427	1.334	0.219
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.245	0.714	0.496
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.408	-1.264	0.242
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.582	-2.022	0.078
Jasa lainnya	0.472	1.516	0.168

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,534 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Sektor ini memiliki kontribusi yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul, tetapi masih terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal sehingga masih memerlukan dukungan pemerintah ataupun swasta untuk mendorong kontribusi dari sektor ini.

2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,427 menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara PDRB dan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh penggerak sektor ini lebih banyak dikendalikan oleh investor swasta sehingga keuntungan dari kegiatan pertambangan sering kali tidak sepenuhnya tinggal di daerah.
3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, nilai korelasi sebesar 0,245 menunjukkan hubungan yang lemah positif menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada PDRB dan pertumbuhan saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini belum cukup berkembang untuk menjadi penggerak ekonomi karena masih berfungsi sebagai layanan dasar sehingga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul sangat kecil.
4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar -0,408 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini saling berbanding terbalik. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa sektor ini tumbuh tanpa kaitan kuat terhadap pertumbuhan daerah yang disebabkan oleh daya beli yang stagnan.
5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, nilai korelasi sebesar -0,582 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan PDRB dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor ini saling berbanding terbalik. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini bisa disebabkan karena kondisi sektor yang stagnan sehingga pertumbuhan ekonomi lebih terfokus pada sektor-sektor lainnya.
6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,472 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan perubahan angka PDRB dan pertumbuhan

ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Sektor ini biasanya mencakup berbagai kegiatan seperti hiburan, pariwisata, atau layanan kecil serta ketergantungan pada konsumsi masyarakat dan peningkatan pendapatan yang bisa jadi lebih responsif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

4.5 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan investasi swasta di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.5 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Investasi Swasta

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.839	4.357	0.002
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.336	1.008	0.343
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
Jasa lainnya	-0.090	-0.257	0.804

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,839 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sektor ini menarik investor swasta karena kuatnya dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor ini.
2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini dikarenakan sektor

tersebut bergantung pada investasi tanpa dukungan dari belanja pembangunan.

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan tidak berdampak pada investasi karena dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah sehingga tidak mampu menarik minat investor swasta.
4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar 0,336 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan investasi saling berbanding lurus. Nilai p-value lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan investor swasta karena ada dasar infrastruktur dari belanja pembangunan, tapi belum sepenuhnya tumbuh.
5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan tidak berdampak pada investasi karena merupakan sektor layanan publik.
6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar -0,090 menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara belanja pembangunan dan investasi swasta pada sektor ini. Nilai p-value lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut belum memiliki data yang cukup kuat untuk mendukungnya atau tidak signifikan secara statistik. Sektor yang mungkin mencakup jenis jasa yang sangat heterogen dapat membuat besaran belanja pembangunan di satu jenis jasa mungkin tidak cukup signifikan untuk memengaruhi keseluruhan sektor. Selain itu, investasi swasta di sektor ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar atau kebijakan yang tidak terkait langsung dengan belanja pembangunan.

4.6 Hubungan antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.6 Korelasi antara Belanja Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.469	1.501	0.172
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.281	0.829	0.431
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.096	0.272	0.793
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.804	-3.830	0.005
Jasa lainnya	0.296	0.875	0.407

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,469 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini bisa mencerminkan efektivitas alokasi anggaran pemerintah dalam mendukung infrastruktur pertanian, penyuluhan kepada petani dan nelayan, serta pengembangan teknologi yang secara bertahap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor tersebut.
2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat belanja pembangunan pada sektor ini. Hal ini disebabkan oleh aktivitas sektor tersebut didominasi oleh pihak swasta dan berada di luar cakupan intervensi fiskal pemerintah daerah.
3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, nilai korelasi sebesar 0,281 menunjukkan hubungan yang lemah dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-

value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh belanja pembangunan yang lebih banyak difokuskan pada aspek lain yang belum langsung menyentuh kebutuhan strategis sektor ini, atau masih dalam tahap awal pengembangan sehingga dampaknya belum terasa sepenuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga keterbatasan investasi infrastruktur dan teknologi dalam pengelolaan air bersih serta sistem pengolahan sampah dan limbah yang efisien.

4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar 0,096 menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan sektor tersebut yang lebih dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, dinamika konsumsi rumah tangga, atau keberadaan pusat-pusat perdagangan, daripada oleh belanja pembangunan fisik atau infrastruktur.
5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, nilai korelasi sebesar -0,804 menunjukkan hubungan yang kuat dan negatif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding terbalik. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini mengindikasikan peningkatan belanja pada sektor-sektor ini justru berpotensi menekan atau tidak secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang disebabkan oleh alokasi anggaran yang lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administrasi, birokrasi, atau belanja yang tidak langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi, seperti belanja untuk penggajian pegawai atau pengeluaran operasional lainnya.
6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,296 menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang berarti antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. Nilai p-

value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Jasa lainnya mencakup sektor-sektor yang mungkin kurang menjadi fokus belanja pembangunan atau bergantung pada faktor lain, seperti konsumsi rumah tangga atau investasi swasta. Hubungan yang lemah ini bisa menunjukkan efek tidak langsung dari belanja pembangunan.

4.7 Hubungan antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.7 Korelasi antara Investasi Swasta dan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor PDRB	Correlation	T-Value	P-Value
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.436	1.371	0.208
Pertambangan dan Penggalian	0.210	0.608	0.560
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.214	-0.618	0.554
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-
Jasa lainnya	0.748	3.183	0.013

Berdasarkan tabel di atas, hasil yang didapatkan dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, nilai korelasi sebesar 0,436 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun tidak terlalu kuat, investasi pada sektor ini mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui beberapa faktor seperti perkembangan teknologi dan metode yang lebih modern dan akses pasar yang lebih baik.
2. Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, nilai korelasi sebesar 0,210 menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan yang

berarti antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi pada sektor ini. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun investasi swasta merupakan penggerak sektor ini, tetapi masih tidak mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mungkin bergantung pada kondisi eksternal dan kebijakan yang diterapkan.

3. Untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya investasi yang ditujukan untuk sektor tersebut.
4. Untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, nilai korelasi sebesar -0,214 menunjukkan hubungan yang lemah dan negatif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih dari 0,05 menandakan bahwa hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun investasi di sektor ini cenderung tidak langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, terdapat dinamika yang lebih kompleks yang mungkin mempengaruhi hasil ini sehingga investasi di sektor ini tetap berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas yang lebih luas.
5. Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, tidak terdapat nilai korelasi karena tidak terdapat investasi pada sektor ini. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya investasi yang ditujukan untuk sektor tersebut.
6. Untuk sektor jasa lainnya, nilai korelasi sebesar 0,748 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif yang menandakan bahwa perubahan yang terjadi pada investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi saling berbanding lurus. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menandakan bahwa hubungan antara investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi untuk sektor jasa lainnya

sangat signifikan dan kuat secara statistik. Hal ini bisa menjadi gambaran bahwa investasi swasta yang mengalir ke sektor-sektor lain seperti pariwisata, hiburan, dan ekonomi kreatif dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Gunungkidul melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konsumsi masyarakat.

4.8 Evaluasi Regulasi dan Strategi Pembangunan Sektor Unggulan

Evaluasi regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada analisis sebelumnya mengenai belanja pembangunan, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang mendukung inovasi teknologi di sektor-sektor unggulan sebagaimana pada poin 4.1 tentang hasil analisis *location quotient* sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, mengingat bahwa sektor-sektor tersebut lebih bergantung pada keunggulan regional daripada keunggulan kompetitif.

Pada poin 4.2, dijelaskan bahwa hubungan antara belanja pembangunan dan sektor unggulan sangat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar. Dengan demikian, regulasi yang memastikan alokasi anggaran pembangunan diarahkan pada sektor prioritas menjadi hal yang esensial untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Sebagaimana diuraikan pada poin 4.3, investasi swasta memainkan peran penting dalam mempercepat pengembangan sektor unggulan. Menurut Markuat (2020), investasi swasta yang terarah pada sektor unggulan tidak hanya meningkatkan efisiensi perekonomian lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif.

Selain itu, regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, seperti yang dijelaskan pada poin 4.4, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Stimson et al. (2006) mengemukakan bahwa regulasi yang transparan dan akuntabel mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta, sehingga memaksimalkan kontribusinya terhadap sektor unggulan. Strategi optimalisasi pembangunan sektor unggulan juga perlu mengintegrasikan hasil evaluasi pada poin 4.5, di mana sinergi antara belanja pembangunan dan investasi swasta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori belanja pembangunan (Musgrave & Musgrave, 1989), regulasi yang mengarahkan

anggaran publik secara efisien akan mendukung pengembangan infrastruktur dan inovasi di sektor unggulan. Dengan demikian, regulasi di tingkat daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan peluang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sebagaimana dibahas pada poin **4.6**, hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa belanja pembangunan yang tepat sasaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Untuk itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, fasilitas produksi, dan jaringan komunikasi, dapat mempercepat pengembangan sektor unggulan, terutama di bidang pariwisata dan agribisnis. Selain itu, pada poin **4.7**, investasi swasta yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi yang optimal.

Sebagai langkah tindak lanjut, rekomendasi strategis berikut dapat diimplementasikan:

1. Reformasi Regulasi

Menyederhanakan prosedur perizinan untuk menarik lebih banyak investasi di sektor unggulan. Hal ini sejalan dengan penelitian Black (2002), yang menunjukkan bahwa regulasi yang sederhana dapat meningkatkan minat investor. Reformasi ini dapat mencakup digitalisasi proses perizinan dan penetapan standar layanan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

2. Kemitraan Publik-Swasta (PPP)

Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan sektor unggulan. Ridwan (2014) menekankan pentingnya kemitraan ini untuk memastikan kesinambungan investasi. Model kemitraan ini dapat melibatkan penyediaan dana bersama untuk proyek strategis, seperti pengembangan destinasi wisata atau pengolahan hasil pertanian.

3. Penguatan Kapasitas Lokal

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan untuk meningkatkan akseptabilitas dan dampak positif regulasi terhadap masyarakat. Pelibatan ini dapat diwujudkan melalui

program pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil, dan penyediaan akses pembiayaan mikro.

4. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas regulasi dan strategi pembangunan. Sistem ini dapat mencakup indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) yang terkait dengan daya saing sektor unggulan dan tingkat investasi.

Dengan pendekatan ini, regulasi dan strategi optimalisasi pembangunan dapat berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan daya saing sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul. Penerapan strategi ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kesenjangan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

4.9 Optimalisasi Belanja Pembangunan Sektor Unggulan

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi ekonomi yang unik sehingga optimalisasi belanja pembangunan sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing sektor unggulannya. Untuk memaksimalkan potensinya, belanja pembangunan harus diarahkan secara strategis pada beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Memperkuat Infrastruktur Produksi dan Distribusi

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang sangat bergantung pada keberadaan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan produktivitas dan mempermudah akses pasar. Selain itu, penyediaan fasilitas seperti pengadaan teknologi yang lebih modern serta subsidi alat dan bahan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan produksi, efisiensi, dan memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Gunungkidul.

2. Mendorong Hilirisasi

Untuk mendukung sektor Pertambangan dan Penggalian, belanja pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan kawasan industri pengolahan tambang akan memungkinkan daerah memperoleh nilai tambah ekonomi dari proses hilirisasi. Dengan adanya smelter atau industri berbasis bahan tambang, daerah tidak hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi

juga mendapatkan multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan PDRB, dan pertumbuhan UMKM pendukung industri.

3. Membangun Sistem Pengelolaan Lingkungan

Dalam hal Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, belanja pembangunan sebaiknya difokuskan pada membangun sistem pengelolaan lingkungan terpadu seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan sistem distribusi air bersih sebagai perlindungan lingkungan, pendorong ekonomi sirkular (daur ulang, pemanfaatan limbah), meningkatkan produktivitas masyarakat, dan pengurangan biaya publik akibat dampak kesehatan dan bencana lingkungan.

4. Revitalisasi Pasar dan Digitalisasi UMKM Perdagangan

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah tulang punggung perputaran ekonomi lokal. Namun, banyak pasar dan pelaku dagang masih menghadapi tantangan seperti fasilitas yang buruk, sistem dagang konvensional, dan minimnya akses digital. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pasar secara fisik dan modernisasi sistem transaksi melalui digitalisasi UMKM yang difokuskan pada pembaruan infrastruktur pasar dan pelatihan pelaku usaha agar mampu mengakses platform digital, e-commerce, dan sistem pembayaran nontunai.

5. Digitalisasi dan Integrasi Layanan Pemerintahan

Untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, belanja pembangunan sebaiknya ditekankan pada pengembangan layanan digital, dashboard layanan, dan sistem perizinan terpadu. Hal ini berguna untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memperkuat kepercayaan publik dan investor terhadap pemerintah daerah. Pelayanan yang cepat, akurat, dan akuntabel akan mempercepat pengambilan keputusan investasi dan memperlancar koordinasi antar sektor.

6. Mempromosikan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Sektor jasa lainnya yang mencakup industri kreatif, wisata budaya, dan perhotelan dapat dioptimalisasi dengan memberikan hibah dan bantuan keuangan bagi pengusaha lokal di bidang seni, kerajinan, dan jasa terkait

pariwisata. Selain itu, *branding* dan pemasaran untuk mempromosikan Gunungkidul sebagai destinasi budaya dan ekowisata akan semakin mendorong sektor ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, seperti berikut:

1. Berdasarkan analisis *location quotient*, sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa lainnya.
2. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang signifikan antara alokasi belanja pembangunan dengan pertumbuhan sektor-sektor unggulan, seperti konstruksi dan jasa lainnya. Investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Sektor jasa lainnya, yang erat kaitannya dengan pariwisata, juga mendapat dorongan dari belanja pemerintah.
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah telah mendukung sektor unggulan melalui alokasi anggaran yang terfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, peran regulasi masih perlu diperkuat untuk menarik investasi swasta di sektor yang potensial, terutama sektor jasa perusahaan yang masih membutuhkan penguatan daya saing.
4. Optimalisasi belanja pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan melalui investasi pada infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas belanja pembangunan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang ditunjukkan, seperti berikut:

1. Pemerintah perlu melanjutkan investasi di sektor konstruksi dengan memperhatikan efisiensi proyek dan keberlanjutan. Pemanfaatan bahan lokal dan kolaborasi dengan sektor swasta yang dapat meningkatkan efisiensi biaya.
2. Potensi sektor jasa lainnya, seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu dikembangkan melalui promosi yang efektif, peningkatan fasilitas umum, dan pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata.
3. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan insentif untuk mendorong investasi swasta di sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Kemitraan publik-swasta dalam menyediakan layanan dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas cakupan.
4. Regulasi perlu disesuaikan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, terutama untuk sektor jasa perusahaan. Dukungan berupa penyederhanaan birokrasi dan insentif fiskal dapat mendorong pertumbuhan sektor ini.
5. Belanja pembangunan harus diarahkan secara strategis pada sektor yang memberikan dampak ekonomi terbesar, sambil memastikan distribusi yang merata untuk mencegah ketimpangan antarwilayah di Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar Dalam Menata Bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustino, L. (2011). Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Aristanto, E. (2019). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang*.
- Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). *Regional Economics and Policy (3rd ed.)*. Blackwell Publishers.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177-200.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmaji, Dwi, and Zuly Qodir. 2021. "Policy Implementation to Improve Tourism Destination Based on Local Wisdom in Gunungkidul Regency Yogyakarta, Indonesia". *Journal of Education, Society and Behavioural Science* 34 (2):90-102. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2021/v34i230308>.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-66.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Gunungkidul.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. *Journal of Economic Perspectives*, 16(4), 185-205.
- Bartels, C. P. A., Nicol, W. R., & van Duijn, J. J. (1982). Estimating the impact of regional policy: A review of applied research methods. *Regional Science and Urban Economics*, 12(1), 3-41.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

- Berzeg, K. (1978). The empirical content of shift-share analysis. *Journal of Regional Science*, 18(3), 463-469.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal decentralization in developing countries. Cambridge: Cambridge University Press.
- Black, J. (2002). Critical Reflections on Regulation. *Australian Journal of Legal Philosophy*, 27, 1-35.
- Blakely, E.J., & Bradshaw, T.K. (2002). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- BPS. (2024). Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka 2024. Badan Pusat Statisti
- BRIN. (2024). Indeks Daya Saing Daerah 2023. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Wokingham, England: Addison-Wesley.
- Easterly, W., & Rebelo, S. (1993). Fiscal policy and economic growth: An empirical investigation. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 417-458.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoover, E. M., & Giarratani, F. (1984). *An Introduction to Regional Economics* (3rd ed.). Alfred A. Knopf.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Laporan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kemendagri RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2023). Indeks Daya Saing Daerah Indonesia 2023. Bappenas.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Kitson, M., Martin, R., & Tyler, P. (2004). Regional competitiveness: An elusive yet key concept? *Regional Studies*, 38(9), 991-999.

- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maryudi, A., Nawir, A. A., Permadi, D. B., Purwanto, R. H., Pratiwi, D., Syofi'i, A., & Sumardamto, P. (2015). Complex regulatory frameworks governing private smallholder tree plantations in Gunungkidul District, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 59, 1-6.
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran di Sulawesi Tenggara. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 325-335.
- Maulana, Y. S., Munawar, A. H., Hadiani, D., Ratningsih, Wibisono, T. (2020). Location Quotient Analysis (LQ) in Determining the Excellent Commodity. *Proceedings of the 1st International Conference on Science, Health, Economics, Education and Technology (ICoSHEET 2019)*, 27, 65-68. Atlantis Press. 10.2991/ahsr.k.200723.015.
- Mulyadi, S. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur*, 9(1), 41-60.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022. Pemkab Gunungkidul.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pigou, A. C. (1932). *The Economics of Welfare (4th ed.)*. Macmillan.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. New York: Free Press.
- Porter, M. E. (1998). Clusters and the new economics of competition. *Harvard Business Review*, 76(6), 77-90.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating shared value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97-118.
- Pribadi, Y., Nurbiyanto. (2021). Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient dan Shift-Share Analysis. *Inovasi Pembangunan - Jurnal Kelitbangan*, 9(3), 299-310.
- Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & Gunawan, A. F. (2023). *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 75-88.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi (Vol. 1)*. Sah Media.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Ricardo, D. (1817). *On the principles of political economy and taxation*. London: John Murray. [Link to book](#).
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. CEPR Discussion Paper No. 4767.

- Rogahang, A. Y., Kumenaung, A. G., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 33-72.
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Rondinelli, D. A., & Cheema, G. S. (1983). Implementing decentralization policies: An introduction. In G. S. Cheema & D. A. Rondinelli (Eds.), *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries* (pp. 9-34). Beverly Hills: Sage.
- Rondinelli, D. A., McCullough, J. S., & Johnson, R. W. (1989). Analysing decentralization policies in developing countries: A political-economy framework. *Development and Change*, 20(1), 57-87. doi:10.1111/j.1467-7660.1989.tb00341.x
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Saragih, J. P. (2022). Optimalisasi Belanja Daerah dan Daya Saing Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 27-42.
- Saragih, J.P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schwab, K. (2018). *The Global Competitiveness Report 2018*. *World Economic Forum*. Link to report.
- Selznick, P. (1985). *Focusing Organizational Research on Regulation*. In R. Noll (Ed.), *Regulatory Policy and the Social Sciences*. University of California Press.
- Setiawan, H., & Erison, Y. (2023). The Women-Based Welfare (WBW): Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), 129-141.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Orasi Ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah", Bandung.
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39-59.

- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain. (2016). *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press.
- Sirojuzilam, & Sumarno. (2016). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Medan: USU Press.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342-345.
- Smoke, P. (2001). *Fiscal decentralization in developing countries: A review of current concepts and practice*. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
- Smoke, P. (2003). Decentralisation in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration & Development*, 23(1), 7-16. doi:10.1002/pad.255
- Smoke, P., & Lewis, B. D. (1996). Fiscal decentralization in Indonesia: A new approach to an old idea. *World Development*, 24(8), 1281-1299.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: Studi kasus data panel di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12(1), 109-122.
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional: Studi kasus data panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 27-36.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Stigler, G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3-21.
- Stimson, R.J., Stough, R.R., & Roberts, B.H. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. Berlin: Springer.
- Sukirno. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 278-298.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Tanzi, V., & Davoodi, H. (1997). Corruption, public investment, and growth. *IMF Working Paper*, 97/139.

- Ter-Minassian, T., & Craig, J. (1997). Control of subnational government borrowing. In T. Ter-Minassian (Ed.), *Fiscal federalism in theory and practice* (pp. 156-172). Washington, DC: International Monetary Fund.
- Tiebout, C. M. (1956). A pure theory of local expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wenjuan, S., & Zhao, K. (2023). Balancing fiscal expenditure competition and long-term innovation investment: Exploring trade-offs and policy implications for local governments. *PLoS ONE*, 18(11), e0293158. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293158>.
- Widodo, T. (2013). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPF.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- World Economic Forum. (2019). *The Global Competitiveness Report 2019*. Geneva: World Economic Forum.
- World Economic Forum. (2023). *The Global Competitiveness Report 2023*. WEF.
- Wu, H., Li, Y., Hao, Y., Ren, S., & Zhang, P. (2020). Environmental decentralization, local government competition, and regional green development: Evidence from China. *Science of The Total Environment*, 708, 135085. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135085>.
- Yuwono, S., Indrajaya, T., & Hariyandi. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah: Katalis Untuk Integrasi dan Optimasi Good Governance*. Sada Kurnia Pustaka.